

Judul : Audit Hambalang - PPATK agar Telusuri Aliran Dana
Tanggal : Sabtu, 03 November 2012
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

AUDIT HAMBALANG

PPATK agar Telusuri Aliran Dana

JAKARTA, KOMPAS — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan diminta menelusuri aliran dana proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Alasannya, ada indikasi kerugian negara hingga Rp 243,6 miliar.

Demikian salah satu rekomendasi Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat yang diserahkan kepada pimpinan DPR, Rabu (14/11). Anggota BAKN DPR, Teguh Juwarno, saat dihubungi pada Kamis (15/11), menjelaskan, BAKN mengeluarkan enam rekomendasi setelah menelaah hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyek Hambalang.

"Salah satunya, kami meminta PPATK untuk melakukan penelusuran aliran dana yang menyebabkan kerugian negara sampai Rp 243,6 miliar," katanya.

Indikasi kerugian itu berasal dari selisih pembayaran uang

muka pekerjaan konstruksi yang sudah dilaksanakan, yakni Rp 116,93 miliar ditambah kelebihan harga pelaksanaan konstruksi Rp 126,734 miliar.

BAKN melihat, kerugian negara itu timbul lantaran ada kerja sama tidak sehat antara Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Kabupaten Bogor, kontraktor, dan subkontraktor. Karena itu, BAKN juga merekomendasikan agar Komisi Pemberantasan Korupsi menuntaskan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus Hambalang. Apalagi, BAKN telah membuktikan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pengelola proyek.

BAKN juga meminta pimpinan Komisi X dan Kelompok Kerja Anggaran DPR bertanggung jawab atas proses pembahasan dan persetujuan proyek Hambalang. Rekomendasi lainnya, meminta DPR menggunakan hak bertanya kepada pemerintah untuk men-

jelaskan mengenai temuan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang.

BAKN juga mengeluarkan rekomendasi untuk BPK agar menjelaskan kebocoran informasi hasil audit investigasi tahap I sebelum penyerahan kepada DPR. BPK juga didesak segera menyelesaikan audit lanjutan untuk mengungkap kerugian dan penyelewengan lainnya.

Tanggung jawab Menpora

Menurut Ketua BAKN Sumarjati Arjoso, penyimpangan proyek Hambalang menjadi tanggung jawab Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng. Pasalnya, menpora-lah yang memiliki kewenangan sebagai pengguna anggaran. Karena itu, tidak mungkin Andi tidak mengetahui mengenai proyek Hambalang.

"Dia tidak bisa sekadar bertanggung jawab secara moral. Kewenangan pengguna anggaran melekat padanya sebagai seorang menteri," katanya. (NTA)